

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH BKAD
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Ishlah Fadhilah, NIM 2010843020, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh BKAD Kabupaten Sijunjung, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2025. Dibimbing Oleh Drs. Yoserizal, M.Si dan Kusdarini, S.IP., MPA, Skripsi ini terdiri dari 197 halaman dengan referensi menggunakan 10 buku teori, 4 buku metode, 4 Skripsi, 5 Jurnal, 5 Wabsite, 5 Peraturan, dan 5 Dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya Peraturan yang mengatur tentang PBB-P2 yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tetapi masih rendahnya kepatuhan wajib Pajak serta minimnya sosialisasi, dan pemuktahiran data objek pajak.

Penelitian ini menggunakan metode dan desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling dan teknik keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut belum dapat terpenuhi secara utuh. Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, tujuan dari kebijakan belum tercapai sepenuhnya karena indikator keadilan belum terpenuhi. Variabel sumber daya manusia masih terdapat kekurangan dari segi kuantitas begitupun dari segi sumber daya non manusia. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik. Karakteristik agen pelaksana sudah berjalan dengan baik. Demikian juga dengan disposisi para pelaksana yang mendukung dan memahami pelaksanaan kebijakan tersebut. Pola hubungan birokrasi di internal pelaksana sudah berjalan dengan baik. Kondisi sosial dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari respon masyarakat ada yang patuh dan ada yang tidak patuh dalam membayar pajak. Pada variabel ekonomi masih belum mendukung secara optimal. Pada indikator kondisi politik sudah berjalan dengan baik, namun masih belum maksimal untuk dukungan dari elit politik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemungutan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), BKAD Sijunjung

ABSTRACT

Ishlah Fadhilah, NIM 2010843020. Implementation of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Collection Policy by the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Sijunjung Regency. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, 2025. Supervised by Drs. Yoserizal, M.Si., and Kusdarini, S.IP., MPA. This thesis comprises 197 pages and draws on references including 10 theoretical books, 4 methodological books, 4 undergraduate theses, 5 journals, 5 websites, 5 regulations, and 5 official documents.

This research aims to analyze and describe the implementation of the PBB-P2 collection policy carried out by BKAD Sijunjung Regency based on Regent Regulation No. 24 of 2021. The research is motivated by the presence of this regulation, yet taxpayer compliance remains low, socialization efforts are limited, and the updating of taxable object data is inadequate.

This research uses descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, documentation, and observation. Informants were selected using purposive sampling, while data validity was ensured through source triangulation. The analysis applied Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn's policy implementation model, consisting of six variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, socio-economic and political conditions, and implementers' dispositions.

The result indicate that the implementation of the PBB-P2 collection policy in Sijunjung Regency has not been fully effective, as the intended policy goals have yet to be achieved, particularly with regard to fairness. Human and non-human resources remain insufficient. However, inter-organizational communication, implementing agents' characteristics, and bureaucratic relations are functioning well, and implementers demonstrate supportive dispositions. Social conditions reflect mixed public responses, with some taxpayers complying and others remaining non-compliant. Economically, supporting factors remain suboptimal, while political conditions show progress, though support from political elites is still limited.

Key words: Policy Implementation, Tax Collection, Land and Building Tax, Rural and Urban (PBB-P2), BKAD Sijunjung